

Pendidikan dan Sosialisasi Politik Masyarakat Dimasa Covid-19

Minto Santoso

Universitas Islam Balitar Blitar, Indonesia

Email: indonesiasentosa86@gmail.com

Abstrak: Tujuan dilakukan penelitian ini untuk memperoleh gambaran bentuk pendidikan dan sosialisasi politik beserta partisipasi masyarakat Kecamatan Nglegok yang datang ke TPS pada pemilihan bupati dan wakil bupati blitar 2020. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif serta dukungan data kuantitatif penelitian ini menghasilkan beberapa gambaran: 1) upaya melaksanakan pendidikan dan sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati Bitar 2020 dimasa pandemi oleh PPS se-Kecamatan Nglegok dilakukan dalam beberapa hal, yaitu: a). Membuat facebook PPS, b). Melakukan *update story whatsapp* secara serentak berkaitan dengan informasi dan kegiatan tahapan selama penyelenggaraan pemiliha bupati dan wakil bupati blitar 2020, c). Melakukan pertemuan tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. 2) Capaian efektifitas sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh PPS se-Kecamatan Nglegok sangat tinggi yakni:a). Capaian pengetahuan masyarakat mengenai pemilihan mencapai 99%, b). Capaian pengetahuan masyarakat mengenai tanggal pemilihan mencapai 90%, c). Partisipasi masyarakat datang ke TPS mencapai 67%.

Tersedia Online di

http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php/Riset_Konseptual

Sejarah Artikel

Diterima pada : 01-10-2022

Disetujui pada : 20-10-2022

Dipublikasikan pada : 30-10-2022

Kata Kunci:

pendidikan politik, efektifitas sosialisasi, partisipasi masyarakat

DOI:

http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v6i4.591

PENDAHULUAN

Negara yang menganut paham demokrasi mensyaratkan partisipasi politik masyarakat dalam menjalankan proses pemerintahan bernegara. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat dalam negara tersebut memiliki kepekaan terhadap setiap masalah politik yang ada serta memiliki semangat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Keadaan demikian menggambarkan bahwa masyarakat telah ikut terlibat dalam mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis. Partisipasi politik merupakan bagian utama dan satu keharusan bagi setiap warga negara sebagai pemilik kedaulatan untuk ikut serta dalam proses demokrasi.

Akan tetapi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik yang terjadi di masyarakat khususnya di kabupaten Blitar masih sangat rendah dan belum sesuai dengan target yang diimpikan, hal ini menjadikan hambatan dalam proses demokrasi. Hal tersebut terlihat dari pidato yang disampaikan ketua KPU Kabupaten Blitar saat upacara pelantikan dan pembekalan panitia pemilihan kecamatan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Blitar tahun 2020. Hadi Santosa mengatakan bahwa angka partisipasi kehadiran masyarakat dalam periode pilkada langsung meski cenderung mengalami kenaikan tapi masih sangat rendah yakni, periode 2005 sebesar 55%, periode 2010 sebesar 56% dan periode 2015 sebesar 56,7%.

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu sangat rendah. Masih banyak hak pilih masyarakat yang tidak digunakan dengan semestinya. Adanya perilaku tersebut menggambarkan mengenai rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Blitar. Rendahnya tingkat partisipasi politik dianggap sebagai indikator

bahwa warga negara enggan turut serta dalam proses demokrasi dan tidak memiliki perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Asraf, M. menyebutkan bahwa kehadiran masyarakat di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak suaranya merupakan tanda bahwa mereka telah berpartisipasi dalam Pemilu ”.

Keadaan pandemi (Covid-19) menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara dalam pengelolaan dan pelaksanaan demokrasi dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Penyelenggara pemilu dari tingkat kabupaten hingga level desa harus mengambil langkah kreatif dan inovatif sebagai upaya memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan proses pemilihan dimasa pandemi, mengingat segala aktivitas politik harus tetap menerapkan protokol kesehatan minimal memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan yang tidak lebih dari lima puluh orang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tindakan yang dilakukan penyelenggara pemilu di tingkat desa (PPS) di wilayah Kecamatan Nglepok untuk melaksanakan tugas dan fungsinya memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk upaya mengenalkan program, tahapan, serta teknik pelaksanaan pemilihan dimasa covid. Dengan upaya yang telah dilakukan dapat diketahui seberapa besar pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut sehingga langkah tersebut dapat dijadikan referensi penyelenggaraan proses demokrasi serupa diwaktu mendatang.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Subyek penelitian adalah penyelenggara di tingkat desa yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) se wilayah kecamatan Nglepok, serta masyarakat yang terdata memiliki hak pilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati blitar tahun 2020 sebanyak 578 yang tersebar proporsional di setiap desa di kecamatan Nglepok. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap anggota PPS, angket terhadap warga yang tercatat dalam data pemilih dan dokumentasi yaitu data survey KPU dan data D-Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Nglepok. Dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif diharapkan mampu memberikan gambaran atas data yang diperoleh.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil

1. Bentuk edukasi dan sosialisasi pemilihan dimasa pandemi

Berdasarkan hasil wawancara kepada PPS se-Kecamatan Nglepok yang membidangi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat mengungkapkan bahwa bentuk edukasi dan sosialisasi yang dilakukan berupa menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan pemilihan kepada masyarakat. Baik itu bentuk tahapan pemilihan, timeline bahkan mengenai aturan pelaksanaan yang harus dilakukan oleh masyarakat, termasuk juga di dalamnya larangan-larangan atau potensi pelanggaran yang bisa terjadi. Mereka juga mengungkapkan bahwa masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan terhadap kinerja dan proses pelaksanaan tahapan yang harus dilakukan serta memberi masukan jika memang dipandang perlu substansi tersebut disampaikan.

Bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat untuk mensukseskan pemilihan dimasa pendemipun juga disampaikan oleh PPS kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya teknik pemilihan yang harus tetap mematuhi standart protokoler kesehatan. PPS juga menyampaikan segala bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk kehadiran atau keterlibatan fisik harus tetap mematuhi prokes termasuk juga meminimalisir pertemuan tatap muka dengan sasaran

sosialisasi. Dan jika terpaksa harus tatap muka, dilakukan dengan penerapan protokoler kesehatan yang ketat.

Tindakan yang banyak dilakukan oleh PPS dalam rangka edukasi dan sosialisai meliputi optimalisasi media sosial khususnya facebook PPS yang khusus menyampaikan berita, pengumuman maupun kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan. Upaya optimalisasi facebook ini dilakukan dengan menambah pertemanan sebanyak mungkin terkhusus akun yang berdomisili di desa PPS bertugas. Disamping itu media yang digunakan berupa WA/ WAG berupa *update story* secara berkala tentang hal-hal yang menyangkut pemilihan. Pemasangan alat peraga sosialisasi di tempat strategis berupa spanduk, baliho, poster dan pamflet. Serta juga melakukan sosialisai tatap muka dengan ketentuan.

Edukasi dan sosialisai tatap muka diupayakan seminimal mungkin, kecuali untuk hal yang memang sangat penting seperti pertemuan lintas tokoh, verifikasi data pemilih dan penyampaian teknik pelaksanaan pemilih. Adapun pertemuan tatap muka jikapun harus digelar maka mereka menerapkan protokol kesehatan diantaranya: 1) peserta tidak boleh lebih dari lima puluh orang, 2) saat masuk dicek suhu tubuhnya, apabila suhu di atas 37,5⁰C maka tidak diizinkan untuk masuk, 3) menggunakan masker, 4) menggunakan handsanitizer dan 5) menjaga jarak antar peserta sosialisasi minimal satu meter.

Media sosial yang dimaksimalkan pengelolaanya untuk edukasi dan sosialisasi yaitu facebook. Nama facebook PPS di Kecamatan Nglegok tergambarkan dalam tabel 4.1 berikut ini

No	PPS Desa	Nama Faebook	Foto Profil	Pertemanan
1	Bangsri	Pps Bangsri		1908
2	Dayu	Pps Dayu		18
3	Jiwut	Pps Jiwut		871
4	Kedawung	Pps Kedawung		1153
5	Kemloko	Pps Kemloko		703
6	Krenceng	Pps Krenceng		389
7	Modanagan	Pps Modangan		1914
8	Ngoran	Pps Ngoran		353
9	Penataran	Pps Penataran		2549
10	Sumberasri	Pps Sumberasri		1170
11	Kel. Nglegok	Pps Nglegok		586

Disamping facebook PPS juga memaksimalkan media WhatsApp yakni dengan update story dan juga membagi melalui WAG yang dimilikinya. Memasang alat peraga soasialisasi berupa banner, spanduk, pamflet, umbul-umbul maupun stiker di tempat-tempat yang strategis seperti Pos Kamling, papan pengumuman, rumah tokoh warga, calon tempat untuk TPS, pertigaan atau perempatan jalan, pasar atau pusat perbealanjaan, kantor pemerintahan dan

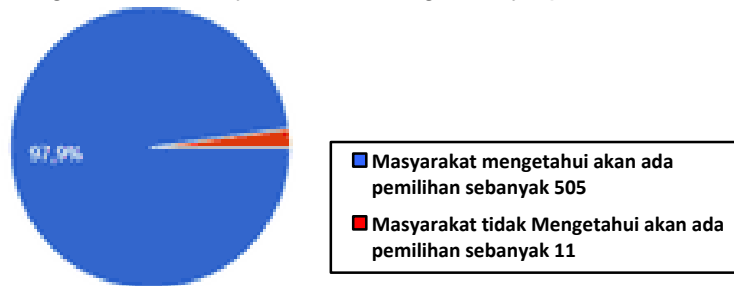
disekitar lembaga pendidikan atau tempat ibadah. Edukasi dan sosialisasi juga dilakukan oleh PPS melalui *ledang* yakni memberikan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan kendaraan dan alat pengeras berkeliling di lingkungan warga setempat.

2. Capaian sosialisasi

Capaian sosialisasi dalam penelitian ini yaitu pengetahuan masyarakat tentang adanya pemilihan, tanggal pelaksanaan, calon yang berkompetisi serta sumber informasi. Untuk hal ini dilakukan survey selama sekali di kecamatan Nglegok pada bulan Oktober serta mengambil data dari survey KPU tentang capaian sosialisasi pada bulan November.

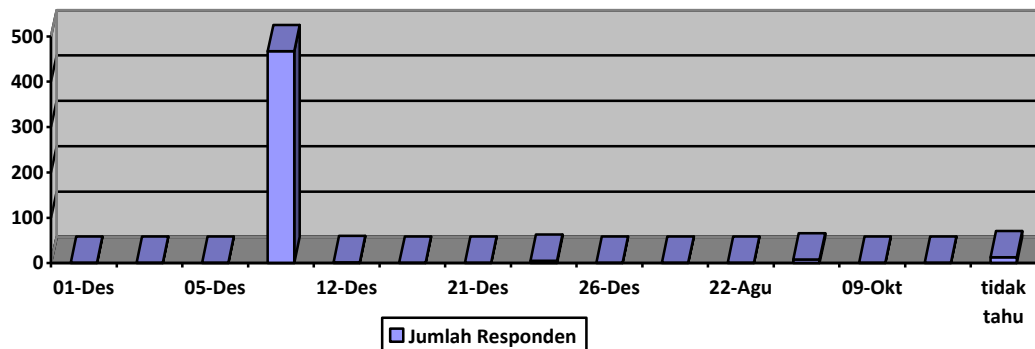
Data hasil survey di Kecamatan Nglegok pada bulan Oktober dengan melibatkan 516 responden yang tersebar di seluruh kecamatan Nglegok.

a. Pengetahuan masyarakat tentang adanya pemilihan



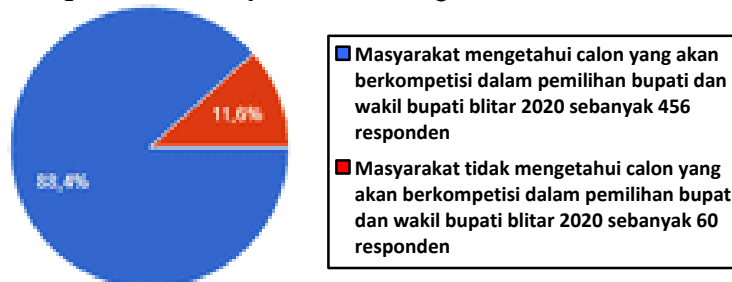
Gambar1. Pengetahuan masyarakat mengenai akan adanya pemilihan

b. Pengetahuan Masyarakat tentang tanggal pemilihan



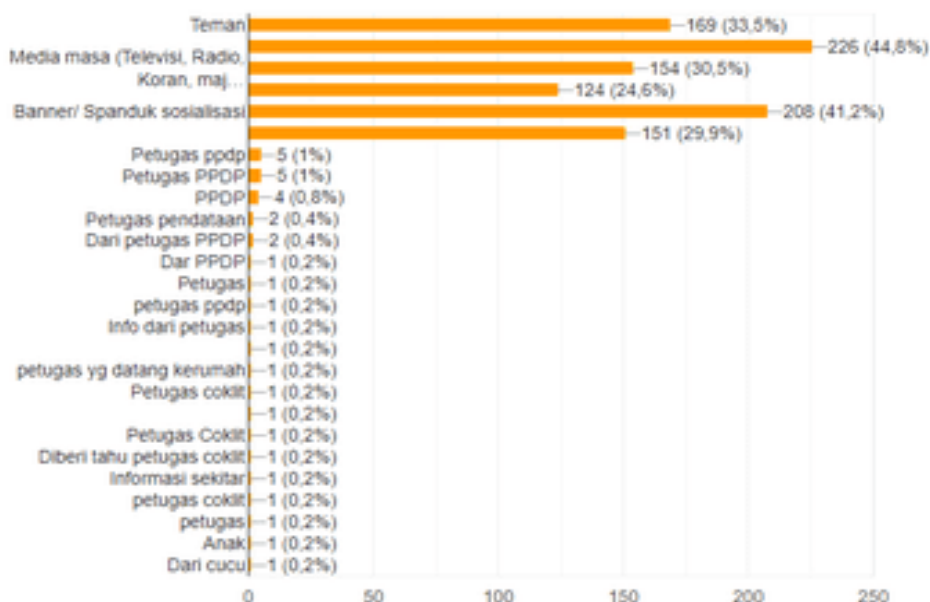
Gambar 2. Pengetahuan masyarakat mengenai tanggal pemilihan

c. Pengetahuan masyarakat tentang calon



Gambar 3. Pengetahuan masyarakat mengenai calon

d. Sumber informasi yang diperoleh masyarakat



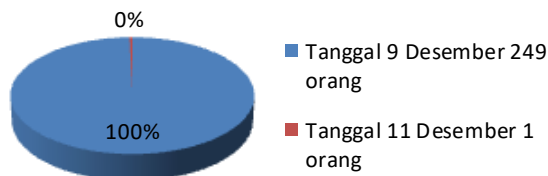
Gambar 4. Sumber masyarakat mendapatkan informasi
Disamping hasil survey yang dilakkan PPK Nglegok juga menggunakan data yang diambil dari hasil survey KPU Kab. Blitar tentang evaluasi capaian sosialisasi pada bulan November, namun hanya mengambil data dari Kecamatan Nglegok yang melibatkan 253 responden yang tersebar di seluruh kecamatan Nglegok.

a. Pengetahuan masyarakat tentang adanya pemilihan



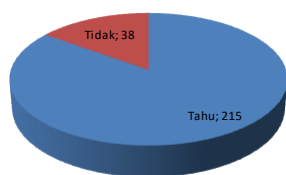
Gambar 5. Pengetahuan masyarakat mengenai pemilihan

b. Pengetahuan Masyarakat tentang tanggal pemilihan



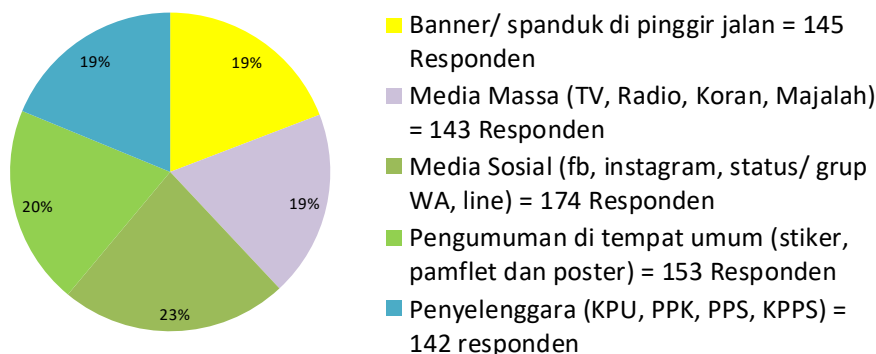
Gambar 6. Pengetahuan masyarakat mengenai tanggal pemilihan

c. Pengetahuan masyarakat tentang kandidat yang mengikuti kontestasi pemilihan

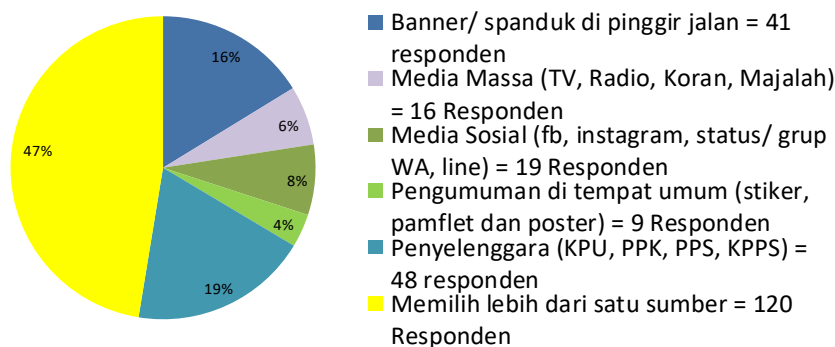


Gambar 7. Pengetahuan masyarakat mengenai calon

d. Sumber informasi yang diperoleh masyarakat



Gambar 8. Jenis Sumber informasi mengenai pemilihan yang diketahui masyarakat



Gambar 8. Sumber informasi masyarakat mengenai pemilihan

3. Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang datang ke TPS untuk menyampaikan hak pilih mereka. Jumlah partisipasi masyarakat Kecamatan Nglegok dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Data pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Blitar tahun 2020

A. DATA PEMILIH		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK	28.873
	PR	28.782
	JML	57.655
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)	LK	7
	PR	42
	JML	49
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	28
	PR	48
	JML	76
4. Jumlah Pemilih ($A.1+A.2+A.3$)	LK	28.908
	PR	28.872
	JML	57.780
B. PENGGUNA HAK PILIH		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	18.100
	PR	20.431
	JML	38.531
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>) yang	LK	4

menggunakan hak pilihnya	PR	41
	JML	45
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	28
	PR	48
	JML	76
	LK	18.132
4. Jumlah pengguna Hak Pilih ($B.1+B.2+B.3$)	PR	20.520
	JML	38.652

Pembahasan

Pemilihan dimasa pandemi memang menuntut kreatifitas dan efektifitas penyampaian informasi kepada masyarakat oleh penyelenggara. Bentuk optimalisasi yang dilakukan oleh PPS se-Kecamatan Nglegek yakni dengan memanfaatkan media sosial dan media online berupa membuat facebook PPS dan memperbanyak pertemanan serta mengunggah setiap tahapan melalui update story whatsapp. Keberadaan media sosial dan media online lainnya yang memberikan keberagaman informasi serta menjamin keterbukaan dan kebebasan penggunaannya, dapat dijadikan referensi kepada para pengguna untuk digunakan sebagai salah satu media komunikasi yang paling murah dan mudah diakses, (Bennett, 2008).

Adanya beberapa aspek media sosial yang tidak dimiliki oleh agen sosialisasi keluarga, lembaga pendidikan, media massa, serta lembaga pemerintah menjadikan media sosial dapat diterima dengan mudah oleh kaum muda. Aspek tersebut merupakan konten dan pendekatan yang dilakukan melalui media sosial. Pertama, isu-isu yang berkaitan langsung dengan kaum muda dan politik kekinian merupakan konten yang dibahas dalam media sosial. Sehingga konten tersebut dapat merangsang generasi muda mendalami lebih jauh mengenai isu yang menjadi minat mereka. Kedua, kebebasan mencari informasi yang mereka inginkan merupakan sifat dasar kaum muda, hal ini tentu disesuaikan dengan isu yang menjadi perhatian mereka. Ketiga, informasi yang terdapat dalam media sosial menggambarkan opini dari berbagai sudut pandang, baik masyarakat, elit politik, maupun kelompok masyarakat tertentu (Octafitria, 2018).

Disamping memanfaatkan media sosial PPS juga melakukan pemasangan alat peraga sosialisasi atau kampanye di tempat-tempat strategis seperti, balai desa/ kelurahan, pasar atau pusat perbelanjaan, pos kamplang, pertigaan atau perempatan jalan, papan pengumuman serta ruang-ruang kosong yang mudah diakses. Kegiatan ini sejalan dengan apa yang pernah dikaji oleh Eka Budiawan. Alat peraga kampanye yang berbentuk baliho, umbul-umbul, dan spanduk telah banyak membantu masyarakat pemilih dalam menentukan pilihan, masyarakat pemilih menyatakan bahwa fasilitasi alat peraga kampanye pasangan calon bukanlah penyebab atau tidak berkaitan dengan penurunan partisipasi masyarakat. Bahan kampanye yang berbentuk poster, brosur, dan pamflet dapat membantu masyarakat mengetahui program dan visi misi pasangan calon, dari 6 (enam) informan yang terdiri dari penyelenggara tingkat kecamatan dan desa serta masyarakat pemilih menyatakan bahwa visi misi pasangan calon dapat diketahui dari bahan kampanye berbentuk poster yang terpasang di rumah-rumah warga dan warung milik masyarakat (Budiawan, 2016).

Untuk memaksimalkan informasi yang tidak bisa dijangkau oleh beberapa segmen maka PPS juga menyelenggarakan sosialisasi tatap muka terhadap berbagai bentuk kelompok atau komunitas seperti jamaah yasin, tokoh masyarakat, kelompok pemuda maupun sosialisasi tatap muka berbasis perorangan. Pada komunikasi tatap muka baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok maupun kelompok dengan masyarakat maka pengaruh hubungan

interpersonalnya termasuk dalam pemahaman *two step flow communications* (Burhan, 2013).

Karena dilaksanakan dalam masa Covid-19 maka segala bentuk pertemuan tatap muka tetap mematuhi protokoler kesehatan diantaranya:

1. Menggunakan masker
2. Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer
3. Menjaga jarak aman minimal satu meter
4. Jika berada dalam kerumunan suhu tubuh dicek dan tidak boleh melebihi 37,3⁰
5. Jika berada di dalam ruangan tidak diperkenankan menghidupkan AC
6. Jumlah peserta tidak boleh melebihi limapuluh orang
7. Kegiatan dianjurkan tidak melebihi dari tiga jam

Dengan banyak hal yang dilakukan oleh PPS dala rangka melakukan sosialisasi mengenai tahapan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar 2020 menuai hasil yang positif. Hal ini terbukti bahwa 99% masyarakat sudah mengetahui bahwa akan ada pemilihan dan lebih dari 90% mereka mengetahui tanggal pelaksanaannya. Sebanyak 88,4% masyarakat juga sudah mengetahui calon bupati dan wakil bupati yang akan mereka pilih. Selain dari itu partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS juga relatif besar yaitu 67%.

Aktivitas-aktivitas politik seseorang menggambarkan seberapa aktif mereka terlibat dalam partisipasi politik, dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah Kota Malang tahun 2013 partisipasi politik masyarakat mencakup partisipasi politik Konvensional, hal ini terlihat berupa pemberian suara pemilihan kepala daerah tahun 2013 di Kota Malang. Dari 612.565 pemilih yang terdaftar dalam DPT, 399.648 pemilih diantaranya datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya atau sekitar 65% (Y. Usfinit, 2014)

KESIMPULAN

Dalam upaya melaksanakan edukasi dan sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati bitar 2020 kepada masyarakat oleh penyelenggaran dimasa pandemi, PPS se-Kecamatan Nglegok melakukan beberapa hal, yaitu: 1) Membuat facebook PPS dan Melakukan *update story whatsapp* untuk mengunggah segala hal yang berkaitan dengan informasi dan kegiatan tahapan selama penyelenggaraan pemiliha bupati dan wakil bupati blitar 2020; 2) Memasang alat peraga sosialisasi di tempat strategis; 3) Melakukan pertemuan tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Capaian efektifitas sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh PPS se-Kecamatan Nglegok tergolong sangat tinggi yakni: 1) pengetahuan masyarakat mengenai pemilihan mencapai 99%; 2) pengetahuan masyarakat mengenai tanggal pemilihan mencapai 90%. Media penyampai informasi yang menurut masyarakat efektif yakni media komunikasi berupa radio, facebook, WAG serta pemasangan alat peraga sosialisasi di tempat strategis.

Capaian partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar 2020 di Kec. Nglegok dalam bentuk kehadiran di TPS mencapai 67%.

DAFTAR RUJUKAN

- Adlin, J., & Amin, R. M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkadaes Serentak Di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2015,. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Bennett, W. (2008). *Changing Citizenship in the Digital Age*. Cambridge: MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. The MIT Press.
- Budiawan, E. (2016). *Sosialisasi Politik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Burhan, B. (2013). *Sosiologi komunikasi, Teori, paradigma dan diskursus teknologi komunikasi di masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Haryono, D., Margono, A., & Syahrani. (2016). Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015. *Jurnal Administrasi*, 204-215.
- Juditha, C., & Darmawan, J. (2018). Penggunaan Media Digital Dan Partisipasi Politik Generasi Milenial. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 94-109.
- Juditha, C., & Darmawan, J. (2018). Penggunaan Media Digital Dan Partisipasi Politik Generasi Milenial. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 94-109.
- Octafitria, Y. (2018). Media Sosial Sebagai Agen Sosialisasi Politik Pada Kaum Muda. *Indonesian Journal of Sociology and Education Policy*, 13 - 34.
- Prasetyo, M. W., & Adnan, M. (2019). Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 159-165.
- Putra, A. D. (2016). Inovasi Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu. *Jurnal Academica Fisip*, 139-151.
- Subekti, T. (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum*. Semarang, Indonesia: IKIP Semarang Press.
- Y. Usfinit, d. (2014). Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 38-45.